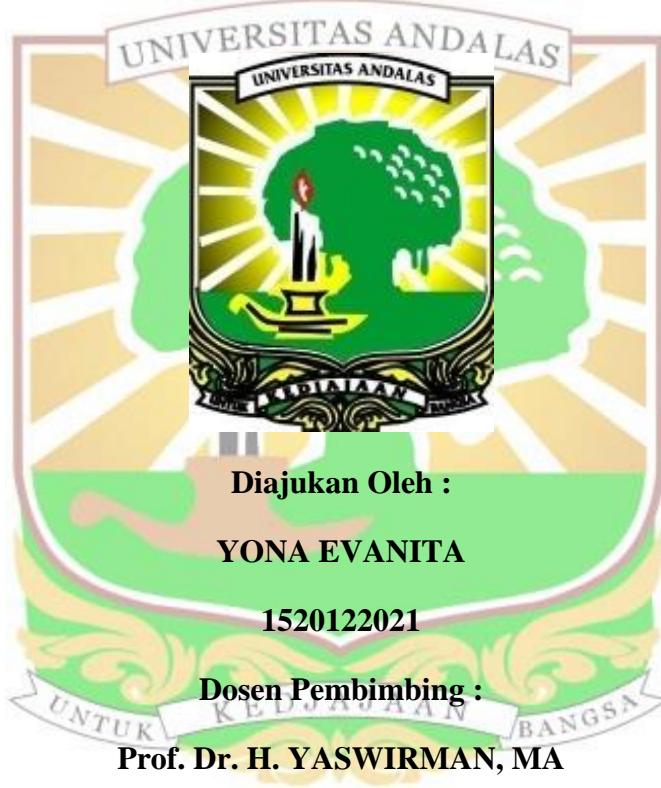


TESIS
EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM
DALAM SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP TANAH
DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Magister Kenotariatan



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017

EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM
DALAM SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP TANAH
DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
(Yona Evanita, 1520122021, Program Studi Magister Kenotaritan
Universitas Andalas)

ABSTRAK

Kematian seseorang menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, salah satunya mengenai penyelesaian pembagian harta warisan. Masalah pembagian warisan yang sering terjadi yaitu mengenai penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan. Sengketa waris antar umat Islam akan diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan hukum waris Islam. Sementara kebiasaan masyarakat di Minangkabau masih menjunjung nilai hukum kewarisan adat. Hukum Islam bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1 (Annisa ayat 11). Hal ini akan berdampak pada sulitnya melaksanakan putusan pengadilan tersebut di tengah-tengah kebiasaan masyarakat *matrilineal*. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah : (1) Apakah penyebab sengketa waris terhadap tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang ? (2) Bagaimanakah eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang? (3) Apakah akibat hukum eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah ? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer berupa data yang diambil langsung di lapangan melalui wawancara dengan hakim, notaris dan pegawai BPN Kota Padang Panjang. Data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari putusan serta buku-buku kepustakaan. Dari penelitian yang penulis lakukan penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : Penyebab terjadinya sengketa waris di Pengadilan Agama Padang Panjang adalah pihak tergugat menjadikan hukum Minangkabau sebagai alasan untuk mengusai harta tersebut, upaya penyelesaian damai secara kekeluargaan tidak kunjung berhasil, harta warisan belum difaraidhkan dalam jangka waktu yang lama, banyaknya harta peninggalan pewaris yang belum terbagi, harta waris berada ditangan pihak tertentu dan beberapa pewaris hendak menjual harta peninggalan tersebut dikarenakan sangat membutuhkan uang. Putusan hakim pada perkara nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP dilaksanakan dengan sukarela sesuai dengan amar putusan pengadilan. Akibat hukum eksekusi putusan pengadilan adalah putusan pengadilan tersebut mengikat kedua belah pihak yang nantinya akan melakukan pembagian hak milik atas tanah. Prosedur melakukan pembagian hak milik atas tanah yang berasal dari tanah warisan dengan alas hak putusan hakim di Badan Pertanahan Kota Padang Panjang adalah pengurusan balik nama hak milik turun waris, pemecahan sertifikat induk, pembagian hak bersama sesuai porsi yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Kata Kunci : Eksekusi, Sengketa, Harta Waris

**EXECUTION OF JUDGE'S DECISION
IN INHERITANCE DIVISION DISPUTE OF SOIL
IN RELIGION COURT PADANG PANJANG**
**(Yona Evanita, 1520122021, Magister of Notary Department of
Universitas Andalas)**

ABSTRACT

People's death gives some legal effects to their inheritors. One of the effects is related to division of inheritance which often causes problem among the inheritors, especially in determining who deserves the inheritance and how it should be distributed. The inheritance dispute among Islam's people will be resolved in Religion Court based on Islamic hereditary law. In Islamic law, the division of inheritance between men and women is 2:1 (An Nisa: section 11). However, difficulty will arise in applying this law in Minangkabau where everything is relied on matrilineal custom. Therefore, the problems that will be discussed in this thesis are: (1) What is the trigger of inheritance dispute toward soil in Religion court Padang Panjang? (2) How is the execution of Judge's decision in inheritance division dispute toward soil in Religion court Padang Panjang? (3) What are the legal effects? In resolving the problems, the writer did a research by using empirical jurisdiction. Primary data are taken directly on the field by interviewing judges, notary public, and BPN officers of Padang Panjang City. Secondary data are obtained from judges' decisions and library research. After conducting the research, it can be concluded that: the trigger of inheritance dispute in Religion Court of Padang Panjang City is defendants use Minangkabau customary law as the reason to take over the inheritance, reconciliation efforts does not give significant result, the inheritance does not *faraidh* yet for a long time, most of the inheritance are not divided yet, the inheritance is not held by certain people, and some heirs want to sell the inheritance because it requires money. Judge's decision in case no 0236/Pdt.G/2014/PA.PP is executed voluntarily based on court's decision. The legal effect of the court's decision is that it ties the two parties who will split the land's ownership. Procedures of splitting the land's ownership in BPN of Padang Panjang City are arranging the ownership transfer of the inheritance, splitting the main certificate, disposing the collective right based on the portion determined by the court's decision.

Key words: Execution, Dispute, Inheritance